**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU DALAM
REHABILITASI PASCA BENCANA BANJIR DI KABUPATEN ROKAN HULU
PADA TAHUN 2019**

Oleh: Aldi Maat Syahfutra

Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Post-disaster rehabilitation is a step to normalize physical and social conditions. Rehabilitation after physical and social disasters is carried out based on derived guidelines from BNPB and local governments. This study discusses the role of the Rokan Hulu Regency Government in Post-Flood Rehabilitation in Rokan Hulu Regency in 2019. Throughout 2019 data, it was recorded from a total of 16 sub-districts in Rokan Hulu Regency, 12 of them were affected by flooding, which means 75% of the existing sub-districts. . The purpose of this study is to determine the implementation of post-disaster physical and social rehabilitation. This study uses qualitative methods with data collection techniques are interview and documentation techniques.

The results of the study explain that the implementation of physical and social rehabilitation after the flood disaster that occurred in Rokan Hulu Regency in 2019 was optimal based on the indicators for the implementation of rehabilitation, namely the restoration of disaster areas, restoration of public facilities, distribution of assistance for the restoration of residents' residences, improvement of the mental condition of disaster victims, distribution health assistance, conflict resolution and management, improvement of community, social and cultural conditions, improvement of comfort and order, improvement of the role of government, improvement of the role of public services which are then implemented by applying a priority scale of needs in accordance with the impacts caused by disasters.

Keyword: Rehabilitation, Physical, and Social

A. PENDAHULUAN

Menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tingkat kemungkinan terjadinya bencana alam relatif besar, wilayahnya sendiri sendiri terletak diantara tiga lempeng utama yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo Australia yang mampu menimbulkan potensi rawan gempa, gunung berapi, tsunami, serta banjir bandang. Selain itu Indonesia berada pada kawasan beriklim tropis yang terdiri hanya dari musim kemarau dan musim hujan, ketika memasuki musim hujan kondisi yang terjadi adalah rawan longsor dan banjir, kemudian di musim kemarau akan menimbulkan kekeringan parah hingga yang paling buruk adalah terjadinya kebakaran banjir.

Dalam pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, negara telah mengeluarkan pedoman konkrit untuk menunjang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana demi mencapai hasil yang maksimal yaitu melalui adanya dikeluarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Peraturan ini menyampaikan peran pemerintah daerah adalah berhak mengusulkan permohonan bantuan dalam upaya rehabilitasi kepada pemerintah dan nantinya akan dilakukan verifikasi dari tim yang bertugas disetiap bagian pemerintah atau bagian non pemerintah yang nantinya

mengikutsertakan BPBD dan melalui jalur koordinasi dari kepala BNPB. Program rehabilitasi pasca bencana ini juga dijelaskan menjadi tugas pemerintah yang bersangkutan yang daerahnya menjadi korban atas peristiwa yang terjadi dengan wajib menggunakan dana alokasi bencana APBD kabupaten/kota.

Salah satu tujuan BPBD adalah memastikan terlaksananya pengendalian bencana secara teratur, terstruktur, terkordinasi dan keseluruhan (Hasanah et al. 2021). Dalam peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 sendiri menjelaskan peran BNPB/BPBD dalam melakukan rehabilitasi yang melibatkan aktivitas pembaruan fisik dan pengembalian fungsi non-fisik. Upaya rehabilitasi dilakukan di daerah yang terdampak bencana ataupun daerah lain yang berpotensi untuk menjadi lokasi tujuan pelaksanaan rehabilitasi. Rehabilitasi dilaksanakan oleh BNPB jika status bencana adalah tingkat nasional atau berdasarkan keinginan sendiri BNPB dan BPBD untuk tingkat bencana daerah. Kegiatan rehabilitasi juga memungkinkan untuk bekerjasama dengan banyak pemegang kepentingan dan masyarakat.

BPBD Kabupaten Rokan hulu sendiri memiliki landasan hukum yang menjadi pedoman untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada BPBD untuk wilayah Rokan hulu, hal ini dijelaskan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerjabadan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam hal kegiatan pascabencana sendiri diatur dalam seksi rehabilitasi dan rekonstruksi dalam struktur BPBD Rokan hulu, dan pasal 10 diatur bahwa terdapat 21

peran oleh seksi rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Rokan hulu bagian/seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki, yaitu :

- a) pemetaan kegiatan dan perencanaan pendanaan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b) pembagian peran, membina, melakukan pengecekan dan melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- c) Melakukan pengumpulan data akibat bencana dalam rangka penyusunan rencana pemulihan sarana dan prasarana vital
- d) Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana perbaikan lingkungan daerah bencana
- e) Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan rehabilitasi prasarana dan sarana umum
- f) Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pasca bencana
- g) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
- h) Menyusun bahan kebijakan dalam rangka pemulihan sosial psikologis masyarakat terkena bencana
- i) Mengkoordinasikan sistem pelayanan kesehatan pada daerah terkena bencana pada pasca bencana
- j) Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan, metode, sistem rekonsiliasi dan resolusi konflik
- k) Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya serta keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik
- l) Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan kembali prasarana dan sarana pada daerah yang terkena bencana pada pasca bencana
- m) Mengumpulkan bahan dan data dalam Pembangunan sarana sosial masyarakat
- n) Melaksanakan/menyusun upaya pembangkitan social budaya masyarakat
- o) Melakukan pengkoordinasian dalam rangka penerapan rancang bangun yang tepat serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
- p) Menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan partisipasi dan peran serta lembaga organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam rekonstruksi pasca bencana
- q) Melaksanakan kegiatan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana
- r) Menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya
- s) Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan-kebijakan dan peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat
- t) melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- u) melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Undang- Undang No 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa rehabilitasi

pascabencana adalah pembaruan dan memperbaiki semua bagian pelayanan masyarakat hingga pada tahap yang mencukupi di daerah terdampak bencana dengan tujuan utama untuk pemulihan atau berfungsinya secara normal seluruh bagian pemerintahan dan aktivitas warga di wilayah terdampak bencana.

Dalam pemulihan kondisi masyarakat pasca bencana rehabilitasi menjadi aspek yang sangat perlu di perhatikan dalam pelaksanaannya yang terdiri dari rehabilitasi sosial dan fisik, rehabilitasi sosial sendiri terdiri atas tiga tujuan program, yakni bantuan, perlindungan, dan pemulihan sosial. Terjadinya bencana juga membutuhkan jenis lain dari rehabilitasi, yakni rehabilitasi fisik yang mana hal ini ditujukan pada pemulihan sarana dan prasarana yang terdampak.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Hal ini tentu berbeda dengan kebijakan sebelumnya seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kebanjiran yang memberikan kewenangan pengelolaan rehabilitasi banjir sampai ke tingkat Kabupaten/Kota.

Kabupaten Rokan hulu sebagai salah satu kabupaten yang memiliki kawasan banjir rusak, dilakukan usaha rehabilitasi banjir melalui Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Banjir (KPH) Singingi. Kesatuan Pengelolaan Banjir (KPH) Singingi merupakan salah satu bentuk KPH yang telah diusulkan agar dapat memberikan arahan dan acuan bagi pengelola Kesatuan Pengelolaan Banjir untuk menjalankan tugas, fungsi dan perannya dengan baik. Hal ini sesuai dengan aturan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya.

Kesatuan Pengelolaan Banjir ini merupakan cerminan integrasi (kolaborasi/ sinergi) dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Struktur organisasi dan rincian tugas dan fungsinya memberikan jaminan dapat memfasilitasi terselenggaranya pengelolaan banjir secara lestari.

Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebanjiran Provinsi Riau, pada tahun 2019 terdapat arahan kebijakan nasional pembangunan kebanjiran untuk tahun 2019 yaitu masalah ditingkat tapak, perlu diberikan intervensi (regulasi dan anggaran) sehingga perbaikan kinerja dapat berjalan optimal. Kemudian implementasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah perlu adanya kesepahaman desain kelembagaan perangkat daerah, dan dilakukan pemetaan urusan pemerintahan, upaya meujudkan penetapan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran. Kemudian pada tahun 2019 arahan pembangunan adalah penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

B. KERANGKA TEORITIS Negara Developmentalis (*Developmental State*)

Analisis dalam penelitian ini dituntun oleh kerangka teoritis yang berfungsi untuk menyederhanakan dan mengklarifikasi konsep konsep dan alur pemikiran dalam penelitian ini. Berdasarkan teori *Developmental State* yang diperkenalkan oleh Chalmers Jhonson, menyatakan bahwa inti dari konsep *developmental state* ini berfokus pada peran krusial pemerintah dalam upaya untuk mampu mengembangkan dan memaksimalkan fungsinya.

a. Peran Negara

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah agen dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.²

Sebagai pengintegrasian kekuatan politik, negara mempunyai sifat memaksa, memonopoli dan sifat mencakup semua. Negara merupakan sesuatu yang bersifat abstrak. Maka dalam kenyataannya tindakan negara dilakukan oleh sekelompok orang yang berwenang dengan cara-cara tertentu.

Developmental State dinilai menekankan pada peran negara yang besar yaitu dengan menekankan pada proses administratif yang berpusat kepada aktor profesional negara. Dengan kata lain, negara masih kuat memegang penuh kekuasaannya. Oleh karena itu, negara berorientasi pada peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang dimilikinya. Teori ini beranggapan bahwa negara yang kuat akan mampu melahirkan kebijakan dan aturan yang akan ditaati oleh masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan sifat negara yang cenderung memaksa.³

b. Intervensi Negara

Negara yang memegang kekuasaan berhak untuk melakukan intervensi dalam setiap keputusan kebijakan. *Developmental state* menganggap bahwa negara merupakan perwujudan ambisi normatis atau moral untuk menggunakan kekuatan intervensi negara dalam

memandu kebijakan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan tersebut.

Negara *Developmental state* melakukan perencanaan secara rasional yang bertujuan untuk mempengaruhi arah dan laju pertumbuhan dan pembangunan perekonomian negara dengan langsung melakukan intervensi pada proses pembangunan. Dapat dikatakan negara *developmental state* cenderung menggunkan pengaruhnya untuk memimpin aktor-aktor dalam negara untuk mencapai kesejahteraan negara daripada mengandalkan mekanisme pasar yang cenderung tidak terkoordinasi dalam mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya.³

Mengenai intervensi Negara dalam pengaruhnya, secara umum terdapat 3 dampak yang dijabarkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan maka tugas pokok yang harus dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu: "Pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*)". Dalam peran terbarunya pemerintah harus mampu menjelaskan bahwa pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, dan pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

¹ Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebanjiran Provinsi Riau Tahun 2019

² Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2002), hlm. 38

³ Khairul Anwar, *Politik Pengelolaan DAS di Riau: Negara Harus Kuat*, (LPPM Unri, Pekanbaru, 2019), hlm 283.

Negara yang memegang kekuasaan berhak untuk melakukan intervensi dalam setiap keputusan kebijakan. *Developmental state* menganggap bahwa negara merupakan perwujudan ambisi normatis atau moral untuk menggunakan kekuatan intervensi negara dalam memandu kebijakan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan tersebut.

Negara *Developmental state* melakukan perencanaan secara rasional yang bertujuan untuk mempengaruhi arah dan laju pertumbuhan dan pembangunan perekonomian negara dengan langsung melakukan intervensi pada proses pembangunan. Dapat dikatakan negara *developmental state* cenderung menggunkan pengaruhnya untuk memimpin aktor-aktor dalam negara untuk mencapai kesejahteraan negara daripada mengandalkan mekanisme pasar yang cenderung tidak terkoordinasi dalam mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya.⁴

Teori *developmental state* atau teori pembangunan negara adalah teori yang membahas relasi antara negara terhadap kegiatan pembangunan di negaranya, dengan menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mendorong pembangunan tersebut dengan prioritas pada aktivitas pembangunan. Dalam teori pembangunan negara, gagasan utama yang diusung berangkat dari pemikiran *state-led development* atau negara sebagai pemimpin pembangunan. Jadi, karena negara

⁴ Muhammad Yamin dan Agus Haryanto, *Teori Pembangunan Internasional*, (Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2019), hlm 51.

memegang peran kunci dalam pembangunan, implementasi dari teori ini menuntut adanya *good governance*. Negara diharuskan cukup kuat dan memiliki kemampuan dalam mengontrol wilayah serta sumber daya yang dimiliki.

C. HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM REHABILITASI BANJIR DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2019

- 1. Kewenangan Pemerintah Pusat Dalam Program Rehabilitasi Banjir**
 - a. Perencanaan Program Rehabilitasi Banjir Oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Indragiri Rokan**

Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam hal perencanaan rehabilitasi banjir skala nasional berdasarkan pola umum, standar, prosedur dan kriteria rehabilitasi banjir secara nasional yang akan diimplementasikan diseluruh kawasan yang menjadi kewenangannya. Untuk di daerah terdapat unit pemerintah pusat yaitu Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS). Selanjutnya adalah pelaksanaan rehabilitasi banjir yang juga dilakukan oleh unit ini sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Kebanjiran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

dan Banjir Lindung yang mana unit ini memiliki tugas dan fungsi dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan rehabilitasi banjir di daerah.

Berdasarkan kebijakan tersebut, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Chalmers Jhonson tentang *developmental state* yang menyatakan bahwa negara yang memiliki peran kuat masih memiliki intervensi terhadap setiap kebijakan yang diputuskan. Sistem yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan asas desentralisasi. Namun dalam kenyataannya, negara masih mengambil peran mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Berdasarkan asas desentralisasi, seharusnya daerah memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan kebijakan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki.

Tabel 2
Kewenangan Pemerintah Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Rehabilitasi Banjir Tahun 2019

No.	Sub Bidang	Kegiatan
1.	Perencanaan rehabilitasi banjir dan lahan termasuk mangrove	1. Penetapan pola umum, norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi banjir dan lahan serta lahan kritis secara nasional. 2. Penyusunan

		dan penetapan rencana rehabilitasi banjir dan lahan DAS/Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan rehabilitasi banjir dan lahan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi banjir pada banjir konservasi.
2.	Pelaksanaan rehabilitasi banjir dan lahan termasuk mangrove	1. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan hasil rehabilitasi banjir konservasi kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.

Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perubahan atau implikasi adanya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah pada bidang kebanjiran yang semula kewenangan dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi

saja. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah inventarisasi banjir dan pengelolaan banjir yang termasuk didalamnya adalah rehabilitasi banjir.

Bentuk perencanaan ini dilaksanakan secara berjenjang dan dituangkan dalam Rencana Tata Kelola Rehabilitasi Banjir dan Lahan (RTKRHL) untuk jangka waktu 15 tahun yang difokuskan pada sasaran lahan kritis. Kemudian dapat diturunkan menjadi rencana yang lebih operasional yaitu Rencana Kegiatan Rehabilitasi Banjir dan Lahan (RKRHL) untuk jangka waktu 5 tahun dan terakhir adalah Rencana Teknik Tahunan. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan pengendalian kegiatan rehabilitasi banjir dan lahan pada tahun 2019, adapun rincian dari rancangan kegiatan tersebut dapat dijabarkan.

Sebagai unit dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebanjiran, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Indragiri Rokan melaksanakan kegiatan rehabilitasi banjir dari pusat diseluruh kawasan yang menjadi kewenangannya. Salah satunya wilayahnya berada di Kabupaten Rokan hulu. Untuk membedakan wilayah kerja agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah daerah, dapat dilihat dari lokus pelaksanaan kegiatan. Namun tidak dapat dipungkiri masih terjadi tumpang tindih kewenangan tersebut karena wilayahnya yang sama dengan wilayah pengelolaan pemerintah daerah.

Perencanaan yang disusun oleh unit Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ini tetap mengacu pada usulan data prioritas kritis dari unit lain seperti Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Banjir yang berada di Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Rokan hulu.

Tabel 3
Rincian Rencana Kegiatan
Rehabilitasi Banjir dan Lahan
Tahun 2019

No.	Rincian RKRHL
1.	RKRHL merupakan rancangan detail dari satu kegiatan rhl yang dilaksanakan disetiap lokasi.
2.	RKRHL sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi banjir dan lahan fisik dan anggaran.
3.	RKRHL dibuat disetiap lokasi yang ditentukan yang mengacu pada lokasi dan luas yang tercantum dalam RTKRHL.
4.	RKRHL memuat masukan dalam penyusunan Renja Dinas terkait.
5.	RKRHL memuat kondisi,

Pelaksanaan program rehabilitasi banjir dalam hal ini akan disiapkan oleh Seksi Rehabilitasi Banjir dan Lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kebanjiran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan DAS dan Banjir Lindung pasal 7 yang menyebutkan bahwa Seksi Rehabilitasi Banjir dan Lahan memiliki fungsi dalam penyiapan bahan rehabilitasi banjir dan lahan dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan reklamasi banjir. Adapun kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh unit ini pada tahun 2019 di Kabupaten Rokan hulu.

a. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Banjir Oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Banjir Singingi

Kesatuan Pengelolaan Banjir Singingi pada tahun 2019 masih berada dalam masa peralihan. Karena Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Banjir masih baru dibentuk pada bulan Septembertahun 2019 dan pengisian jabatan sumber daya manusia baru dibentuk pada Januari 2018. Padahal menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Dinas Kebanjiran di Kabupaten sudah dihapus sejak berlakunya kebijakan pemerintah daerah tersebut. Sehingga untuk tahun 2019, Unit Pelaksana Teknis.

Tabel 6

Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Banjir dan Lahan Oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Banjir

No	Tahun	Kegiatan	Luas (Ha)
1.	2016	Kegiatan Reboisasi Rehabilitasi Banjir dan Lahan	375 Ha
2.	2019	1. Kegiatan Reboisasi Rehabilitasi Banjir dan Lahan. 2. Kegiatan Pembuatan Tanaman Rotan Jernang. 3. Kegiatan Pembuatan Tanaman HHBK (Hasil Banjir Bukan Kayu) 4. Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun	380 Ha 25 Ha 75 Ha 375 Ha

1. Adanya peralihan kewenangan berimplikasi pada dihapuskannya ketentuan yang di gunakan ditingkat Kabupaten/Kota dan digantikan dengan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Banjir yang memerlukan adanya penyesuaian. Dengan demikian, maka pemerintah Provinsi memiliki kewenangan yang lebih besar karena mencakup kewenangan di tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Banjir hanya sebagai pelaksana teknis kegiatan yang bersifat operasional saja.

2. Saran

1. Diharapkan untuk tahun selanjutnya terdapat kelanjutan dalam hal kejelasan kewenangan antara instansi vertikal pemerintah dalam pengelolaan banjir termasuk rehabilitasi banjir. Karena di era otonomi daerah seharusnya daerah lebih memiliki kewenangan besar dalam mengelola daerahnya termasuk urusan konkuren bidang kebanjiran.

Dengan dibangunnya Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Banjir, diharapkan unit ini dapat merencanakan program atau kegiatan rehabilitasi untuk wilayah kawasan luar banjir yang berada dalam kawasan kewenangannya ditingkat Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan peran Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Banjir sebagai implikasi dihapuskannya Dinas Kebanjiran ditingkat Kabupaten/Kota. Karena sejak tahun 2019, unit ini hanya berupaya mengusulkan rancangan program/kegiatan rehabilitasi, sedangkan dalam

pelaksanaan perencanaannya tetap pada pusat maupun ditingkat Provinsi yang memiliki kewenangan tertinggi di daerah padahal sejatinya Kabupaten/Kota lebih memahami kondisi wilayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan:

Budiarjo, Miriam. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.

Yamin, Haryanto. 2019. *Teori Pembangunan Internasional*. Yogyakarta, Pustaka Ilmu.

Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada MediaGroup.

Anwar, Khairul. 2019. *Pengelolaan DAS*. LPPM unri: Pekanbaru.

Hernowo, Basah dan Sulistya Ekawati. 2014.

Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Banjir (KPH) Langkah Awal Menuju Kemandirian. Yogyakarta:PT Kanisius.

Huda, Ni'matul. 2005. *Otonomi Daerah*. Pustaka Pelajar:Yogyakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Banjir. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kebanjiran Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Banjir Lindung.